

# PERKEMBANGAN POLITIK PARTAI MASYUMI PASCA PEMILU 1955

Penulis 1 : Aris Sumanto  
Penulis 2 : Zulkarnain, M.Pd  
[ares.3669.aw@gmail.com](mailto:ares.3669.aw@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Latar belakang berdirinya Partai Masyumi, (2) Gambaran perkembangan Partai Masyumi pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1955, (3) Perkembangan Partai Masyumi pasca pemilu tahun 1955.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap *pertama*, adalah heuristik atau pengumpulan sumber, sumber terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer buku karya A.G Pringgodigdo yang berjudul Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan umum dan sumber sekunder buku karya Deliar Noer yang berjudul Partai Islam di Pentas Nasional. tahap *kedua* adalah verifikasi atau kritik sumber, tahap *ketiga* adalah interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah dan tahap *keempat* adalah historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Latar belakang berdirinya Partai Masyumi dimulai dari para tokoh-tokoh Islam yang memerlukan wadah partai untuk berpolitik serta mencakup seluruh aspirasi umat Islam di Indonesia. Suasana revolusi menurut para tokoh politik Islam sangat sesuai untuk mendirikan partai ditambah lagi adanya maklumat presiden tanggal 3 November 1945 untuk mendirikan partai. Pada tanggal 7-8 November 1945 berlangsung Kongres Umat Islam di Yogyakarta serta memutuskan untuk mendirikan Partai Masyumi. (2) Perkembangan politik partai Masyumi tahun 1945-1949 ditandai dengan eksistensi partai dalam pemerintahan meskipun muncul keretakan di tahun 1947. Pada tahun 1947 saat terbentuk kabinet Amir, ia berhasil mendirikan kembali PSII serta menyatakan diri keluar dari partai Masyumi. Pada tahun 1950-1955 menunjukkan kabinet partai Masyumi dalam pemerintahan yang jatuh bangun. Antara tahun 1950 hingga 1955, partai Masyumi juga mengalami keretakan saat terbentuknya kabinet Wilopo tahun 1952 dengan keluarnya NU. (3) Pasca pemilu 1955, pada tanggal 21 Februari 1957 muncul konsepsi presiden Soekarno yang salah satunya ingin menyatukan empat pemenang hasil pemilihan umum 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, namun tidak disetujui Partai Masyumi. Akhirnya pada awal tahun 1958 tokoh partai Masyumi seperti Natsir dan Sjarifudin Prawiranegara kemudian memimpin Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia sendiri merupakan jawaban daerah atas tidak lancarnya kabinet yang terus menunjukan jatuh bangun. Keterlibatan tokoh partai pada PRRI akhirnya mendorong lahirnya Keppres Nomor 200 tahun 1960 yang menyatakan partai Masyumi harus membubarkan diri. Akhirnya Partai membubarkan diri pada tanggal 13 September 1960.

**Kata Kunci** : Partai Masyumi, Pemilu 1955, Pembubaran Partai.

## ABSTRACT

*This Study aimed to investigate: (1) the background of the establishment of the Masyumi Party, (2) the description of the development of the Masyumi Party during the Parliamentary Democracy in 1950-1955, and (3) the development of the Masyumi Party in 1955.*

*The Study employed the critical historical method consisting of several stages. The first stage was heuristics of source collection. Source were classified into two, namely primary and secondary sources. The primary source was A. G. Pringgodigdo's book entitled Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum and the secondary source was Deliar Noer's book entitled Partai Islam di Pentas Nasional. The second stage was verification of source criticism. The third stage was interpretation of historical facts. The fourth stage was historiography or history writing.*

*The results of the study were as follows. (1) The establishment of the Masyumi Party was initiated by Islamic figures who needed a party as a political means accommodating the aspiration of all Muslims in Indonesia. According to the Islamic political figures, the revolution situation was very conducive for the establishment of a party and furthermore there was a presidential announcement dated 3 November 1945 to establish parties. On 7-8 November 1945 the Congress of Muslims was held in Yogyakarta and decided to establish the Masyumi Party. (2) the political development of the Masyumi Party in 1945-1949 was marked by the party's existence in the government although there was friction in 1947. In 1947 when the Amir cabinet was formed, he was successful in re-establishing PSII and declared to withdraw from the Masyumi Party. The period of 1950-1955 witness the ups and downs of the Masyumi Party cabinet in government. Between 1950 and 1955 the Masyumi Party also experienced friction when the Wilopo cabinet was formed in 1952 with the withdrawal of NU. (3) After general election 1955, on 21 Februari 1957, President Soekarno's conception arouse which, among other, was to unite the four winners of general election 1955, namely PNI, Masyumi, NU, and PKI: however, the Masyumi Party disagreed*

*with it. Finally, at the beginning of 1958, the Masyumi Party figures such as Natsir and Syarifuddin Prawiranegara led Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI itself was a regional answer to the cabinet's lack of success continuously showing the ups and downs. The Involvement of party figures in PRRI finally triggered the issuance of the Masyumi party had to disband. Finally, the Masyumi Party disbanded on 13 September 1960.*

**Keywords:** Masyumi Party, General Election 1955, Party Disbandment.

## I. PENDAHULUAN

Hubungan yang terjadi antara penguasa kolonial beragama Kristen dan pribumi yang beragama Islam menjadi latar belakang hubungan Belanda-Indonesia, dalam hal ini keinginan untuk tetap menjajah mengakibatkan pemerintah kolonial tidak mampu memperlakukan agama pribumi sesuai dengan agama mereka. Latar belakang ini menjelaskan mengapa terjadi kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, meskipun dinyatakan bahwa pemerintah kolonial bersikap netral pada agama.<sup>[1]</sup> Kemunculan partai maupun organisasi karena merasa senasib dan rasa ingin lepas dari penjajah sehingga muncul nasionalisme bangsa Indonesia. Kehidupan partai di Indonesia dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda.

Ketika pimpinan Islam semakin menyadari tentang keresahan, penderitaan rakyat akibat kondisi kolonial dan pentingnya pengaruh politik akhirnya mendorong para Kyai dan ulama untuk menghimpun kekuatan. Landasan ideologi Islam digunakan sebagai perjuangan politik untuk melawan kekuasaan kolonial, hal ini menjadikan Islam sebagai sarana untuk mengangkat harga diri berhadapan dengan kekuasaan kolonial.<sup>[2]</sup> Meskipun demikian antara tahun 1910 sampai 1930 selain ideologi Islam timbul ideologi lain seperti komunis maupun nasionalisme. Islam kemudian tumbuh sebagai dasar pergerakan politik yang berkembang dengan terbentuknya satu wadah bernama MIAI (Majelis Syuro A'la Indonesia). Pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya KH Mas Mansyur, KH Abdulwahab Chasbullah dan KH Ahmad Dahlan berhasil mendirikan MIAI.<sup>[3]</sup> MIAI berdiri atas dasar perlu dibentuknya wadah politik Islam di Indonesia, hal ini dirasakan perlu dan didukung oleh segenap organisasi Islam di Indonesia. Berdirinya MIAI menjadi kekuatan yang mengguncang pemerintah kolonial Belanda. MIAI memperlihatkan harapan besar bagi kaum muslimin Indonesia untuk bergerak mencari kemerdekaan. Kegiatan MIAI turut pula berperan aktif dalam masa pergerakan nasional.

Kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 mempengaruhi perkembangan MIAI, keputusan Jepang seringkali bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Keputusan Jepang salah satunya adalah melarang kegiatan kepartaian. Keputusan ini tentu saja menimbulkan masalah baru bagi partai di Indonesia, tetapi tidak untuk MIAI. MIAI yang diperkenankan terus berdiri dengan cara menyesuaikan nya dengan keinginan perang Asia Timur Raya.<sup>[4]</sup> MIAI pun dalam perkembangannya melakukan upaya untuk mengusir penjajah dari tanah nusantara. Karena itu, pada bulan Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI. Alasan pembubaran MIAI karena Jepang merasa bahwa mereka membahayakan kedudukan Jepang serta perkembangan mereka yang pesat. Apalagi pada waktu itu umat Islam sudah memiliki pasukan militer yaitu Hizbullah, pemuda-pemuda yang dididik militer oleh mereka sendiri.<sup>[5]</sup>

Pada tanggal 7-8 November 1945 di gedung Madrasah Mu'alimin Yogyakarta tokoh-tokoh Islam bersepakat untuk mendirikan partai politik Islam yang pertama yang diberi nama Masyumi atau kepanjangan dari (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).<sup>[6]</sup> Tujuan didirikannya Partai Masyumi yakni "terlaksana ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Illahi, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Tafzir Azas Muhammadiyah yang kedudukannya sebagai penjelas dari ideologi Islam yang dianut partai Masyumi. Pasca pembentukan Masyumi 1945 selama kurun waktu 1949-1955, partai Masyumi ikut serta duduk dalam kabinet. Kabinet Amir Sjarifuddin berhasil menarik PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) untuk keluar dari Masyumi. Peristiwa ini terjadi tahun 1947 sehingga menimbulkan keretakan dalam kalangan Islam walaupun dampak dari keluarnya itu tidak begitu besar. Keluarnya PSII disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di Masyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan kurang

strategis seperti Wondoamiseno dan Arundji Kartawinata.<sup>[7]</sup>

Pada tahun 1950-1955 partai Masyumi mengalami jatuh bangun dalam kabinet. Kabinet pertama diisi oleh Natsir (Masyumi) dan selanjutnya setelah kabinet runtuh diganti dengan Sukiman (Masyumi). Perdana menteri dari dua kabinet tersebut diisi oleh Masyumi sedangkan tujuan dari kabinet tersebut sama yaitu: Program Kabinet Natsir antara lain; Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin kenyamanan dan ketentraman. Membuat dan merencanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan yang menuju perdamaian.<sup>[8]</sup>

Pada tahun 1952 saat kabinet Sukiman berhenti dan digantikan oleh kabinet Wilopo. Muncul masalah baru dalam internal partai yaitu keluarnya NU dari tubuh partai Masyumi. Terpilihnya KH Fakhri Usman (unsur Muhammadiyah dalam Masyumi) menjadi Menteri Agama dalam kabinet Wilopo menyebabkan masalah yang besar hal ini dikarenakan, menteri Agama dalam kabinet sebelumnya selalu dipegang NU dengan KH Hasyim Wahab duduk sebagai menteri.<sup>[9]</sup> NU ingin juga menunjukkan bahwa kalangan ulama berpendidikan tradisional sebenarnya juga mampu mengelola suatu negara modern. Maka, dalam Mukhtamar NU di Palembang 1952, menyatakan diri keluar dari Masyumi. Partai Masyumi yang sudah ditinggal PSII dan NU terus maju hingga pemilihan umum 1955. Perdana menteri Boerhanoedin Harahap (Masyumi) berhasil mengadakan pemilu di tahun 1955. Pemilihan umum tepatnya 25 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum waktu itu sangat menarik karena setiap partai mempunyai pendukung fanatik masing-masing, yang muslim akan ke Masyumi dan NU (Nahdhatul Ulama).

Pemilu 1955 memperlihatkan posisi partai Masyumi yang jaringan pendukungnya luas menggambarkan bahwa partai ini merupakan partai bersifat nasionalis di dalam sistem tersebut. Partai Masyumi diisi pendukung berasal dari luar Jawa yang wilayah Islamnya kuat, seperti Sumatera sehingga mampu menduduki posisi ke dua hasil pemilu.<sup>[10]</sup> Hasil pemilu 4 partai besar yakni PNI, PKI, NU, dan Masyumi yang mengumpulkan suara 75% dari keseluruhan pemilih pada pemilihan umum tahun 1955 dan pemilihan daerah pada tahun 1957. Hasil ini membawa partai Masyumi menjadi bagian pilar pemerintahan selain PNI.

Pasca pemilu 1955, merupakan titik awal berakhirnya partai Masyumi. Selama kurun waktu 1956 hingga 1958 terjadi beberapa masalah pemerintah maupun partai Masyumi yang membawa partai bubar. Posisi mulai bergeser pada saat PKI bangkit kembali dan mempengaruhi kebijakan Soekarno serta diakomodasi dalam pemerintah. Masyumi sebagai partai Islam menolak paham komunisme PKI. Pembentukan kabinet Ali-Roem-Idham setelah pemilu 1955, Soekarno menginginkan PKI dilibatkan dalam kabinet karena menduduki hasil ke empat hasil pemilu 1955. Keinginan tersebut tidak dipenuhi oleh Ali Sastroadmijoyo, Masyumi, NU menolak dan menentang keterlibatan PKI, karena di kabinet sebelumnya terjadi beberapa perselisihan pendapat. Pertentangan antara Soekarno dengan partai Masyumi semakin terbuka saat penolakan konsepsi Soekarno tentang demokrasi dipimpin untuk menggantikan demokrasi parlementer.

Akhir Oktober 1956 adanya keinginan Presiden untuk pembubaran partai politik. Hal ini mendapat reaksi dari pimpinan partai. Presiden Soekarno mengemukakan pikiran supaya pemimpin partai mengadakan pertemuan dan musyawarah serta mengambil keputusan untuk dibubarkannya partai-partai.<sup>[11]</sup> Keputusan Presiden mendapat tanggapan dari Parkindo yang sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah bersama mengundurkan diri dan membentuk kabinet baru dengan bantuan presiden dan wakil presiden.<sup>[12]</sup> Hal ini menambah konsepsi presiden tentang pembubaran partai politik.

Gejolak kabinet serta adanya keputusan presiden akhirnya membawa Masyumi kepada pilihan untuk menarik diri dari kabinet. Sidang awal Januari 1957 pemimpin partai Masyumi telah menarik kelima menteri dari kabinet yaitu Menteri Kehakiman Muljatno dan Menteri Pekerjaan Umum dan

Tenaga Pangeran Noor. Keputusan penarikan keanggotaan partai Masyumi disesali Dewan sidang yang kecewa atas pernyataan partai Masyumi. Penarikan juga dikemukakan pimpinan partai Masyumi, sejak kabinet terbentuk pada Maret 1956 yang menganggap partai Masyumi sudah turut serta membangun bangsa akan tetapi partai Masyumi harus konstan dalam tindakan yang tidak selamanya memberi keyakinan jalan yang dituju tidak ke arah menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara.<sup>[13]</sup>

Penolakan juga dilakukan pada saat dibentuk kabinet karya yang tidak memperhatikan kekuatan parlemen, yaitu kabinet Djuanda yang diumumkan pada 8 April 1957 pasca mundurnya kabinet Ali Rhoem. Penolakan tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden Soekarno yang hendak menyatukan seluruh kekuatan bangsa.<sup>[14]</sup> Partai lain yang semula menolak konsepsi Soekarno seperti NU, akhirnya mulai akomodatif dengan menerima dan mengirim wakil dalam Kabinet Juanda.

Posisi Partai Masyumi yang tidak masuk dalam kabinet serta keterlibatan tokoh partai dalam PRRI (Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia) akhirnya partai Masyumi semakin terpojok. Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan pengambil-alihan oleh Presiden Soekarno seluruh kewenangan pemerintah dalam tangannya.<sup>[15]</sup> Pada tanggal 5 Juli 1960 dengan perintah presiden nomor 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik Presiden Soekarno menjalankan kebijakan penyederhanaan partai politik sebagai pelaksanaan Penpres nomor 7 tahun 1959 tentang syarat syarat dan penyederhanaan partai. Pada 21 Juli 1960 Soekarno memanggil pemimpin-pemimpin Masyumi dan PSI. Memberikan waktu untuk mencukupi syarat kepartaian hingga 30 Desember 1960.

Partai Masyumi menyatakan bahwa Penpres nomor 7 tahun 1959 bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak mengenal bentuk hukum penetapan presiden. Jawaban pimpinan Masyumi dan PSI tidak memuaskan Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1960 dikeluarkan keputusan presiden nomor 200 tahun 1960 yang membubarkan Masyumi dan keputusan presiden nomor 201 tahun 1960 yang membubarkan PSI.

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan telaah atau teori yang menjadi landasan pemikiran. Hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data-data atau informasi yang lebih lengkap mengenai permasalahan yang akan dikaji. Adapun literature yang digunakan penulis sebagai kajian pustaka sebagai berikut.

Buku pertama untuk menjawab rumusan masalah II mengenai tokoh pembentuk partai Masyumi dan tujuan partai Masyumi. buku ini berjudul *Modernisasi dan Fundamentalisme* dalam Politik Islam karya Yusril Ihza Mahendra. Buku ini menjelaskan tujuan pembentukan partai Masyumi yang bertujuan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam. Tokoh pembentukan partai Masyumi terdiri dari beberapa tokoh seperti H. Agus Salim, Mohammad Natsir, Sjarifuddin Prawiranegara. Buku yang kedua berjudul *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960* karya Deliar Noer. buku ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah III. Selama kurun waktu 1945 hingga 1955 partai Masyumi turut duduk dalam pemerintahan meskipun pada perkembangannya terdapat beberapa permasalahan internal partai dengan keluarnya organisasi besar dari partai Masyumi yaitu PSII di tahun 1947 dan NU di tahun 1952. Partai Masyumi selama kurun waktu 1945 hingga 1955 mengalami menjadi oposisi kabinet untuk pertama kalinya di tahun 1953 saat terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kondisi partai Masyumi terus berdiri hingga pemilu 1955 dan memperoleh hasil di posisi ke dua terbanyak dibawah PNI. Buku yang ketiga berjudul *Pembubaran Partai Politik* karya Muchamat Ali Safa'at. Buku ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah IV. Buku ini menjelaskan bagaimana PKI yang mulai mempengaruhi kebijakan presiden Soekarno yang semakin menyudutkan partai Masyumi ditambah keterlibatan anggota partai dalam PRRI semakin mendorong lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang penyederhanaan partai. Pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah mengeluarkan Keppres yang menyatakan partai Masyumi harus membubarkan diri.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses historiografi.<sup>[16]</sup> Metode sejarah adalah seperangkat cara dan petunjuk dalam melaksanakan penelitian sejarah. Metode sejarah membantu penelitian dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Menurut Louis Gottslack terdapat empat tahap dalam penelitian sejarah yaitu pengumpulan data (*heuristic*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*), dan penulis sejarah (*historiografi*).

### 1. Heuristik

Menurut terminologinya heuristik (*heuristic*) berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah.<sup>[17]</sup> Berdasarkan bahannya sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (*dokumen*) dan sumber tidak tertulis (*artifact*). Dokumen dapat berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan artifact berupa foto-foto, bangunan, dan alat-alat.

Menurut urutan penyampaiannya, sumber sejarah dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu A. G Pringgodigdo. *Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum*, 1960 *Mimbar Indonesia*, No. 29. hlm. 6, 1960 *Mimbar Indonesia*, No.31. hlm. 6, *Pedoman Rakyat "Presiden Anjurkan Dikuburkan Partai Partai, 30 Oktober 1956, Pedoman Rakyat "Parkindo setuju kabinet bubar"*, 2 Januari 1957, dan *Pedoman Rakyat "Kesibukan Politik di Ibukota, 11 Januari 1957*. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber sekunder yang digunakan meliputi Yusril Ihza Mahendra. 1999 *Modernisasi dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* Jakarta Selatan:Paramidana, Deliar Noer. 1987 *Partai Islam di Pentas Nasional* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Samsuri. 1967. *Politik Anti Komunis*. 2004 Yogyakarta:Safian Insani Press, dan Syaifullah. *Gerak politik Muhamadiyah dalam Masyumi 1997* Jakarta: Anem Kosong Anem.

### 2. Verifikasi

Tahap selanjutnya, peneliti harus kritis terhadap sumber yang diperolehnya. Pengujian sumber yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan dengan data atau sumber lainnya serta dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kritik sumber yang dilakukan peneliti harus seobyektif mungkin, agar diperoleh data dan sumber yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya. Verifikasi ada dua macam yaitu autentisitas, atau keaslian sumber, atau kritik eksteren, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercaya, atau kritik intern. Autentisitas lebih bersifat fisik, bukan isi dari sumber tersebut. Sementara kredibilitas lebih secara kritis terhadap isi dari sumber.

### 3. Interpretasi

Menguraikan informasi dari data-data dan sumber yang sudah diperoleh serta sudah dipilih merupakan tahap dimana peneliti harus bisa berfikir logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Untuk menemukan fakta sejarah maka dilakukan sebuah analisis dan untuk menyatukan hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis.

### 4. Historiografi

Tahap akhir dalam metode sejarah kritis yaitu historiografi. Berdasarkan dari serangkaian tahap itu kemudian dituangkan peneliti dalam tulisan. Dukungan sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Aspek kronologi merupakan bagian yang penting dalam aspek sejarah. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, (3) Simpulan.

## II. Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi

Ketika tokoh-tokoh Islam semakin menyadari tentang keresahan, penderitaan rakyat akibat kondisi kolonial dan pentingnya pengaruh politik akhirnya mendorong para Kyai dan ulama untuk menghimpun kekuatan. Landasan ideologi Islam digunakan sebagai perjuangan politik untuk melawan kekuasaan colonial. Ideologi Islam terwujud sebagai sarana untuk mengangkat harga diri berhadapan dengan kekuasaan kolonial.<sup>[18]</sup> Pada tanggal 21 September 1937 K.H. Mas Mansyur, K.H. Abdulwahab Chasbullah dan K.H. Ahmad Dahlan berhasil mendirikan MIAI (Madjelis Islam A'la Indonesia), di Surabaya. Ada dua alasan pokok mengapa MIAI didirikan. Pertama, usaha politik Islam pada waktu itu masih belum maksimal, sehingga kesadaran mengadakan badan persatuan dikalangan Islam supaya kedudukan Islam di Indonesia sepadan dengan besarnya umat Islam. Kedua adalah landasan untuk membimbing pemimpin-pemimpin umat dalam membentuk MIAI yang waktu itu dipandang cukup strategis untuk menggaling persatuan diantara partai dan organisasi Islam.

Terbentuknya MIAI menjadi kekuatan baru yang menggetarkan pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah kolonial merasa usahanya sia-sia meskipun sudah melakukan pembuangan pemimpin nasional serta beberapa. Justru kaum muslim malah menjadi lebih gigih dalam menata perjuangan mereka. MIAI merupakan perwujudan kalangan elite tokoh politik Islam untuk menyalurkan kekuatan menghadapi kolonial. MIAI kemudian menjelma menjadi organisasi Islam tumbuh dari masa kolonial hingga ke masa pendudukan Jepang.

Hal ini menunjukkan pengaruh kekuatan umat yang kuat sehingga Jepang merasa perlu menggunakan kekuatan Islam dibawah kaki tangannya kemudian membentuk Masyumi sebagai ganti MIAI. Hingga akhirnya pasca kemerdekaan 1945 terbentuk Masyumi baru murni Indonesia. Pada 1944 kekuatan umat Islam semakin berkembang dengan terbentuknya Hizbullah sebagai kekuatan militer muslim. Kekuatan yang terhimpun merupakan langkah positif yang harus diapresiasi ke dalam wujud kemerdekaan.

Pada 17 Agustus 1945 Soekarno memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan mulai tumbuh dan berkembang partai politik terutama dimulai saat pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945, tentang anjuran mendirikan partai politik, maka partai-partai politik pun lahir. Dalam pembentukan partai politik tampak jelas dari pengorganisasian yang terpengaruh ikatan agama, suku dan kedaerahan. Hadirnya partai politik yang pada mulanya merupakan partai yang berdiri sebagai partai lanjutan pada masa pergerakan nasional. Maklumat tersebut menegaskan pemerintah akan anjuran pendirian partai, partai tersebut antara lain Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) murni Indonesia.

Partai Masyumi berdiri pada kongres tanggal 7-8 November 1945 sepenuhnya merupakan hasil karya pemimpin-pemimpin umat Islam dalam sebuah Muktamar Islam Indonesia bertempat digedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Kongres tersebut juga mengikrarkan Masyumi adalah salah satu partai politik Islam di Indonesia dan partai Masyumi-lah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia. Partai Masyumi muncul sebagai partai yang mengakar di masyarakat Indonesia, karena di isi organisasi utama yaitu NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam hingga berkembang dengan masuknya organisasi baru. Apabila dikaitkan dengan tahun 1945 maka pembentukan partai Masyumi merupakan aspirasi umat Islam sebagai cerminan dan potensi yang kuat dan konkret.

Masyumi didirikan oleh beberapa tokoh Islam, motif pembentukan Masyumi dari para tokoh partai politik dan gerakan keagamaan Islam yang sudah berkembang sejak zaman pergerakan nasional. Tokoh tersebut seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakhar, Dr. Soekiman Wirosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohamad Mawardi, Abdul Wahid Hasim, Muhammad Natsir. Keputusan didirikannya Masyumi oleh tokoh tersebut bukan hanya sekedar keputusan biasa melainkan sebuah keputusan dari seluruh umat muslim melalui wakil-wakilnya. Tokoh-tokoh tersebut mewakili kalangan dan merupakan para pemimpin umat seperti Agus Salim merupakan bekas tokoh SI, Dr. Sukiman mantan pemimpin SI, Abdul Kahar Muzakir dan ki Bangun Hadikusumo adalah tokoh modernis Muhammadiyah. Motif tokoh-tokoh bergabung dalam partai Masyumi karena didorong oleh keinginan menyatukan politik Islam ke dalam satu wadah.<sup>[19]</sup>

Tokoh-tokoh yang mengambil inisiatif pembentukan partai Masyumi berinisiatif mendirikan

kongres yang dihadiri golongan Islam di Indonesia. Berkat usaha dengan berbagai golongan Islam berhasil menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), kongres yang berlangsung di Yogyakarta selama dua hari yang dihadiri sekitar lima ratus utusan organisasi-organisasi sosial-ekonomi, Islam, tokoh-tokoh alim ulama dan tokoh politik. Inisiatif ini diambil oleh keinginan untuk menyatukan potensi kekuatan politik Islam ke dalam satu wadah perjuangan yang besar kuat dan berpengaruh. Tujuan Masyumi menurut Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan oleh KUII pada tahun 1945, adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan Cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

Tujuan partai Masyumi diuraikan dalam dua naskah resmi Masyumi, yaitu pernyataan politik yang dikeluarkan pada November 1945 dan Program perjuangan partai Masyumi yang diumumkan pada 17 Desember 1945. Masyumi percaya bahwa Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat serta kehidupan yang damai antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Pernyataan politik tahun 1945 menjelaskan bahwa partai Masyumi sebagai respon terhadap revolusi Indonesia yang bergolak yaitu tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tindakan Belanda dan kelompok-kelompok kriminal adalah tegas membahayakan kedaulatan Bangsa Indonesia.

### **III. Perkembangan Politik Partai Masyumi Pada Masa Demokrasi Parlementer 1950-1955**

Partai Masyumi yang baru terbentuk sebagai kelanjutan dari MIAI (Madjelis Islam A'la Indonesia) sejak 1937 dan usaha Masyumi buatan Jepang 1943. Partai Masyumi kemudian berkembang menjadi partai besar di Indonesia. Perkembangan politik partai Masyumi tahun 1945-1949 ditandai dengan eksistensi partai dalam pemerintahan meskipun muncul keretakan di tahun 1947. Pada tahun 1947 saat terbentuk kabinet Amir, ia berhasil mendirikan kembali PSII serta menyatakan diri keluar dari partai Masyumi. Partai Masyumi akhirnya mau bergabung dengan kabinet Amir, yang sebelumnya Masyumi menolak untuk duduk dalam kabinet. Pada tahun 1950-1955 kabinet partai Masyumi dalam pemerintahan menunjukkan jatuh bangun. Antara tahun 1950 hingga 1955, partai Masyumi juga mengalami keretakan saat terbentuknya kabinet Wilopo tahun 1952 dengan keluarnya NU. Pada tanggal 20 Maret 1952 NU menuntut kursi menteri agama. Prawoto sebagai wakil perdana menteri meminta formatir Wilopo untuk menyerahkan keputusan siapakah yang duduk di menteri agama.

Keputusan Wilopo menunjuk K.H. Fakih Usman (unsur Muhamadiyah dalam Partai Masyumi) sebagai menteri agama. Keputusan ini akhirnya berujung menjadi mala petaka bagi Partai Masyumi. Pengurus besar NU di Surabaya kemudian merapatkan hal ini serta memperkuat keputusan dengan kongres NU di Palembang yang menyatakan NU keluar dari Partai Masyumi. Sukiman yang menghadiri kongres di Palembang menolak keputusan ini dengan alasan NU adalah organisasi yang berdaulat dan menyarankan sesama muslim untuk bekerja sama. Keluarnya NU dari Partai Masyumi sebenarnya sudah ada benih-benih sejak tahun 1947. Ketika PSII dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) memboikot tindakan Partai Masyumi, yang tidak mau bekerja sama dengan Amir. Pada masa kabinet selanjutnya yaitu kabinet Ali untuk pertama kalinya partai Masyumi tidak duduk dalam kabinet sejak tahun 1945 dan menjadi partai oposisi pemerintahan.

Pasca keluarnya organisasi besar dalam partai Masyumi, partai juga mengalami menjadi oposisi pada kabinet Ali Sastrodarmasjito I. Pertama kalinya selama kurun waktu 1945 hingga 1955 partai Masyumi menjadi oposisi kabinet pemerintahan. Pasca Ali pemerintah kemudian berhasil menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Partai Masyumi yang mengikuti pemilihan umum 1955 akhirnya mendapat perolehan yang tinggi dengan hasil partai pemenang kedua dibawah PNI.

### **IV. Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955**

Pasca pemilu 1955, pada tanggal 21 Februari 1957 muncul konsepsi presiden Soekarno yang salah satunya ingin menyatukan empat pemenang hasil pemilihan umum 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, namun tidak disetujui Partai Masyumi. Partai Masyumi menolak PKI duduk dalam kabinet dikarenakan dikabinet-kabinet sebelumnya terdapat perselisihan seperti masalah Tanjung Morawa. Akhirnya pada awal tahun 1958 tokoh partai Masyumi seperti Natsir dan Sjarifudin

Prawiranegara kemudian pergi ke Sumatra Barat memimpin Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia sendiri merupakan jawaban daerah atas tidak lancarnya kabinet yang terus menunjukan jatuh bangun. Berdasarkan kejadian-kejadian selama kurun waktu 1956 hingga 1958 yang berisi pemberontakan dan ketidakstabilan kabinet akhirnya mendorong Soekarno bertindak tegas dan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pasca munculnya Dekrit Presiden dijumpai ketegangan dalam lingkungan pimpinan partai Masyumi, sehubungan dengan bergabungnya beberapa di antara pemimpin partai dengan PRRI. Pada tanggal 21 Juli Presiden Soekarno memanggil pemimpin-pemimpin Masyumi dan (PSI). Pemimpin Masyumi yang hadir adalah Prawoto Mangkusasmito dan M. Yunan Nasution. PSI yang hadir adalah Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo dan T.A Murat. Sukiman yang bermaksud hadir sedang berada di Yogyakarta Pertemuan tersebut Presiden Soekarno didampingi oleh staf ketiga angkatan, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Kepala Staf Komando Tertinggi, Sekretaris Militer Komando Tertinggi, Menteri Penerangan dan Direktur Kabinet. Presiden dalam pertemuannya menyerahkan setumpuk daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemimpin partai secara tertulis dalam satu minggu. Karena jawaban pimpinan partai Masyumi dan PSI tidak memuaskan Soekarno, akhirnya pukulan terakhir dialami partai pada tanggal 17 Agustus 1960 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 200 tahun 1960 yang membubarkan Masyumi dan Keppres Nomor 201 tahun 1961 yang membubarkan PSI. Keppres Nomor 200 tahun 1960 menyatakan bahwa "Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian atau cabang-cabang atau ranting-rantingnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Demikian pula dengan Keppres Nomor 201 tahun 1960 yang menyatakan "Membubarkan Partai Sosialis Indonesia, termasuk bagian-bagian atau cabang-cabang atau ranting-rantingnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

## **V. Kesimpulan**

Partai Masyumi adalah partai yang beraliran Islam yang terbentuk pada suasana revolusi. Partai Masyumi merupakan jawaban umat Islam atas maklumat presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi tentang anjuran didirikannya partai politik. Pada tanggal 7 November 1945, dalam Kongres Umat Islam di gedung Madrasah Mu'alimin Yogyakarta tokoh-tokoh Islam bersepakat untuk mendirikan partai politik Islam yang pertama yang diberi nama Masyumi atau kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tujuan didirikannya Partai Masyumi yakni "terlaksana ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Illahi. Pendiri partai merupakan para tokoh-tokoh Islam seperti Sukiman, Natsir dll. Program partai mencakup berbagai bidang seperti program pembebasan untuk Irian Barat yang waktu itu masih di tangan pemerintah Belanda.

Perkembangan partai Masyumi pada masa demokrasi parlementer 1950-1955 menunjukan jatuh bangun. Jatuh bangun partai dimulai sejak masa kemerdekaan 1945-1949. Selama kurun waktu 1945-1949 anggota partai duduk di pemerintahan meskipun pada tahun 1947 Amir Sjarifuddin sebagai formatir kabinet berhasil mendirikan PSII kembali. Peristiwa ini menimbulkan keretakan dalam kalangan Masyumi walaupun dampak dari keluarnya itu tidak begitu besar. Berdirinya PSII kembali disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di Partai Masyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan kurang strategis seperti Wondoamiseno dan Arundji Kartawinata. Partai Masyumi akhirnya bersedia ikut dalam kabinet, meskipun sebelumnya menolak kebijakan Amir. Pada tahun 1950-1955 menunjukan pergolakan jatuh bangun Partai Masyumi dalam kabinet. Pada tahun 1952 saat kabinet dipimpin Wilopo. Muncul ketegangan dengan keluarnya NU dalam Masyumi. Keluarnya NU ditandai dengan terpilihnya KH Fakhri Usman (unsur Muhammadiyah dalam NU) menjadi Menteri Agama dalam kabinet Wilopo. Hal ini dikarenakan menteri Agama dalam kabinet sebelumnya Sukiman, dipegang NU dengan K.H. Hasyim Wahab duduk sebagai menteri. Masyumi yang sudah ditinggal PSII dan NU terus maju hingga pemilihan umum 1955. Berikut hasil pemilu 5 besar yang dimenangkan PNI dengan persentase yang sedikit. PNI 22,3% (8.434.653), Masyumi 20,9 % (7.903.886.), NU 18,4% (6.955.141), PKI 16,4% (6.179.914), PSII 2,9% (1.0091.160).

Perkembangan politik partai Masyumi pasca pemilu 1955, menunjukkan pergolakan partai yang bermuara harus dibubarkannya partai Masyumi. Pada tanggal 21 Februari 1957 muncul konsepsi presiden yang salah satunya ingin menyatukan keempat pemenang hasil pemilu ke dalam kabinet. Partai Masyumi, NU menolak dan menentang keterlibatan PKI, karena di beberapa kabinet sebelumnya terjadi perdebatan dengan PKI seperti masalah Tanjung Morawa. Akhirnya di awal tahun 1958 tokoh partai seperti Natsir, Sjarifuddin Prawiranegara pergi ke Sumatera Barat memproklamkan PRRI (Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia) tanggal 15 Februari 1958. PRRI sendiri merupakan jawaban daerah atas tidak lancarnya kabinet yang terus menunjukan jatuh bangun. PRRI mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat Sumatera Barat, sebagian Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Selatan. Pemerintah kemudian mengambil jalan kekerasan untuk menghentikan pemberontakan. Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat di bom angkatan perang pemerintah, demikian juga Manado dan beberapa kota Sulawesi. Kekuatan PRRI akhirnya padam.

Akhir kemelut ketidakharmonisan hubungan beberapa tokoh partai Masyumi dan pemerintahan Sukarno terjadi saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden kemudian memanggil tokoh Masyumi untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama dan kedua menanyakan apakah Masyumi ingin menentang dan mengubah dasar negara. Masyumi dalam jawabannya menyangkalnya dan mengatakan bahwa apa yang dianggap partai sebagai dasar dan tujuan negara ialah seperti yang dicantumkan dalam Mukadimah UUD dan tidak dalam manipol. Pertanyaan ketiga berhubungan dengan PRRI. Partai Masyumi menyangkal keterlibatan beberapa tokohnya karena sebelumnya di kongres Masyumi tahun 1959, mereka sudah menyatakan diri keluar. Pertanyaan keempat apakah Masyumi telah memenuhi persyaratan dalam Penpres 7/1959 (pasal 9(1)4), Masyumi menjawab bahwa masih cukup waktu baginya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut karena kesempatan masih diberikan oleh Penpres tersebut sampai tanggal 31 Desember 1960.

Akhirnya pukulan terakhir dialami partai Islam yang gigih mempertahankan prinsipnya. Pada tanggal 17 Agustus 1960 pimpinan pusat Partai Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang mengemukakan bahwa Masyumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu tanggal 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya, kalau tidak partai Masyumi akan diumumkan sebagai "partai terlarang". Pada tanggal 13 September 1960 pimpinan pusat partai Masyumi Prawoto Mangkusasmito menyatakan partainya bubar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Agus Suminto. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- [2] Musyriyah Sunanto. (2012). *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Abdul Karim. (2005). *Islam dan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Sumbangsih Press
- [4] Zulfikar Gazali dkk. (1989). *Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- [5] Ahmad Syafii Maarif. (1996). *Islam dan Politik Teori belah bambu masa Demokrasi terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [6] Syaifullah. (1997). *Gerak Politik Muhamadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- [7] Ridho Al Hamdi. (2013). *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

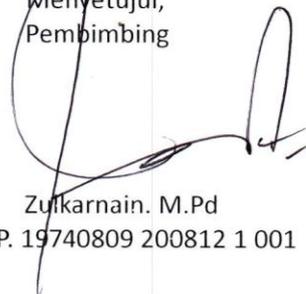
- [8] C.S.T Kansil. (1987). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Angkasa Baru.
- [9] Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- [10] Ichlasul Amal. (1988). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya.
- [11] *Pedoman Rakyat*, "Presiden Anjurkan Dikuburkan Partai Partai", 30 Oktober 1956.
- [12] *Pedoman Rakyat*, "Parkindo setuju kabinet bubar", 2 Januari 1957.
- [13] *Pedoman Rakyat*, "Kesibukan Politik di Ibukota", 11 Januari 1957.
- [14] Muhamad Ali Safaat. (2011). *Perkembangan Pembubaran Partai Politik*. Jakarta:Raja Grafindo Press.
- [15] S.M. Amin. (1967). *Indonesia Dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [16] Louis Gottschalk. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [17] Helius Sjamsudin (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- [18] Musyrihah Sunanto. (2012). *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [19] Yusril Ihza Mahendra. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik sosial*. Jakarta Selatan: Paramadina.

Reviewer



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.  
NIP. 19770618 200312 2 001

Yogyakarta, 16 Juni 2016  
Menyetujui,  
Pembimbing



Zulkarnain. M.Pd  
NIP. 19740809 200812 1 001